



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2009-2010**

JUMAT, 4 DESEMBER 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2009**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2009-2010**

JUMAT, 4 DESEMBER 2009

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,**

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Sidang I Tahun Sidang 2009-2010 yang telah dimulai sejak 1 Oktober 2009. Besok pagi, Dewan akan segera memasuki Masa Reses sampai dengan tanggal 4 Januari 2010 yang akan datang.

Dari catatan Sekretariat Jenderal, Anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir dari semua unsur fraksi yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2009-2010 pada hari ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Sidang Dewan yang terhormat,

Hari ini kami akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang yang akan menguraikan hasil kegiatan Dewan selama Masa Sidang I dalam rangka untuk melaksanakan tiga fungsi Dewan, serta tanggapan Dewan terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita, dan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini yang perlu kita bahas dalam forum yang terhormat ini.

Masa Sidang I berlangsung selama 46 hari kerja atau 65 hari kalender. Merujuk pada UU No. 27 Tahun 2009, Masa Sidang I telah dimulai tanggal 1 Oktober 2009, pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPR-RI. Setelah pengucapan sumpah/janji anggota, Masa Sidang I dilanjutkan dengan pembentukan fraksi-fraksi dan penetapan pimpinan Dewan dalam rapat paripurna yang pertama. Kami berlima, saya selaku ketua dan empat wakil ketua, telah mendapat amanah untuk memimpin Dewan. Oleh karena itu, pada awal tugas kami, selain melakukan pembagian tugas di antara para pimpinan yang ada, Pimpinan Dewan selanjutnya mengawal pembentukan alat-alat kelengkapan Dewan dari Komisi I sampai dengan XI, dan badan-badan alat kelengkapan yaitu Badan Legislasi (Baleg); Badan Kehormatan (BK); Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP); Badan Urusan Rumah Tangga (BURT); Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN); Badan Anggaran; serta Badan Musyawarah DPR.

Alhamdulillah, dengan didahului forum konsultasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi, maka alokasi masing-masing fraksi untuk menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan telah dapat disetujui bersama. Dan pada hari-hari berikutnya dengan dipimpin oleh para Wakil Ketua, masing-masing Pimpinan Badan Alat Kelengkapan DPR dapat dipilih. Dengan demikian, sejak awal November 2009, Komisi dan Badan-badan DPR telah dapat mengawali masa kegiatan melalui penentuan agenda kerja masing-masing.

Sidang Dewan yang terhormat,

Mengawali masa tugas DPR untuk tahun 2009-2014, kami pimpinan Dewan atas dasar prinsip kolegial telah bersepakat untuk membangun kebersamaan dalam mengemban tugas DPR ke depan, untuk mewujudkan DPR yang aspiratif, DPR yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat melalui optimalisasi implementasi tiga fungsi utamanya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Di dalam kerangka itulah, kita bersepakat untuk menanggalkan “warna” dari partai mana kita berasal, karena kita dituntut untuk membangun demokrasi dengan sebaik-baiknya. DPR adalah lembaga politik, karena DPR hasil proses demokrasi. Oleh karena itu, sebagai lembaga perwakilan harus sejalan seiring dengan harapan rakyat. Kita patut bersyukur, dewasa ini pembangunan demokrasi sudah berjalan sesuai dengan kaidah dan konstitusi kita. Kita patut berbangga bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Karenanya, sebagai bangsa besar dan di dalam proses demokrasi, sangat wajar apabila terjadi perbedaan pendapat di dalam menanggapi berbagai masalah besar yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, perbedaan ini tidak boleh mengganggu sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa yang diikat secara jelas di dalam Pembukaan UUD 1945 yang telah mengamankan bahwa pemerintahan negara harus melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bingkai persatuan Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Komitmen Pimpinan Dewan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, dan juga oleh Pimpinan Fraksi dan Anggota Dewan semuanya dalam upaya untuk meningkatkan citra Dewan, agar lembaga yang kita cintai ini tidak senantiasa mendapatkan sorotan

negatif dari rakyat Indonesia yang telah menetapkan pilihannya kepada kita untuk duduk dalam lembaga legislatif. Selanjutnya, Pimpinan Dewan mengajak kepada segenap Anggota Dewan untuk meningkatkan kualitas kinerja Dewan, agar lembaga yang kita cintai ini semakin memperoleh citra positif dari berbagai kalangan masyarakat. Peningkatan kualitas kinerjanya tersebut, antara lain dapat kita tunjukkan melalui peningkatan disiplin kerja yang ditandai dengan kehadiran anggota di dalam rapat-rapat DPR. Terkait dengan hal tersebut, *alhamdulillah*, akhir-akhir ini kehadiran anggota dalam berbagai rapat Dewan telah cukup menggembirakan.

Langkah berikutnya adalah memperkuat peran kita masing-masing di dalam mengoptimalkan fungsi Dewan sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja yang lebih terarah. Oleh karena itu, Pimpinan Dewan yang bertugas untuk melakukan koordinasi dalam upaya untuk menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan Dewan, berusaha agar alat kelengkapan Dewan dan para anggotanya mematuhi Peraturan Tata Tertib dan memegang etika di dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan. DPR sebagai lembaga negara memiliki struktur kelembagaan yang jelas. DPR juga memiliki fraksi-fraksi yang bertugas memberikan arahan di dalam meningkatkan kemampuan, disiplin, dan efektifitas kerja anggotanya dan melakukan evaluasi.

Dalam rangka optimalisasi fungsi legislasi dan anggaran, DPR menetapkan target-target pencapaian di bidang legislasi dan memberikan fokus bagi pelaksanaan fungsi anggaran. Sementara pelaksanaan fungsi pengawasan, lebih diletakkan dalam kerangka pertanggungjawaban kita kepada bangsa dan negara. Dengan mekanisme ini, para anggota Dewan dapat benar-benar mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan, agar tidak keluar dari rel dan aturan yang ditentukan oleh konstitusi kita UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melalui mekanisme *check and balances*, hubungan antar kelembagaan negara kita akan berimbang, berpola secara sistemik dan prosedural. Diharapkan, bahwa nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan tidak saja semata-mata berputar di antara lingkaran kekuasaan dan elit politik, tetapi benar-benar mampu berimplikasi secara nyata bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Dalam upaya peningkatan pencitraan dan penguatan kelembagaan Dewan itulah, kita sepakat untuk lebih terbuka di dalam menerima keluhan dan aspirasi masyarakat, dimana DPR dapat berdiskusi langsung dengan delegasi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya melalui mekanisme yang diatur di dalam Tata Tertib DPR. Dalam kerangka itulah, rapat-rapat Dewan dapat lebih terbuka sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dari keinginan kita bersama, dalam mewujudkan lembaga DPR sebagai lembaga politik yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dalam kerangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas anggota Dewan, Pimpinan DPR merencanakan untuk melaksanakan program **Peningkatan Kapasitas Anggota DPR-RI** yang akan diikuti oleh seluruh anggota DPR pada masa sidang yang akan datang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota DPR, memperdalam wawasan terhadap tugas dan kewenangan serta ruang lingkup kerja yang berimplikasi positif terhadap peningkatan kinerja DPR secara keseluruhan.

Upaya pencitraan DPR ini tidak hanya dilakukan dengan penerapan disiplin dan peningkatan kapasitas para anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, tetapi juga melalui sentuhan nilai-nilai yang asasi, sebagai bentuk penguatan keyakinan spiritual, memperkokoh jati diri dalam membangun karakter dan menjaga moral agar para anggota Dewan dapat semakin dipercaya, kredibel, responsif dan aspiratif, dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, serta kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kerangka itulah,

Pimpinan juga telah memutuskan untuk melaksanakan **Program ESQ (Emotional Spiritual Quotient)** kepada para anggota Dewan **yang menghendaknya**, yang diselenggarakan secara bertahap.

Peningkatan kinerja juga dilakukan oleh Pimpinan Dewan dengan mengarahkan Sekretariat Jenderal agar mampu menjadi *supporting system* yang mampu mendukung efektivitas kinerja Dewan, secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Seiring dengan hal tersebut, BURT juga menyusun rencana strategis (renstra) 5 tahunan, dan berbagai langkah lain yang terukur, sebagai implementasi mendukung pelaksanaan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Tata Tertib DPR.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pimpinan Dewan dan Pimpinan fraksi-fraksi menetapkan bahwa fungsi ini merupakan fungsi yang harus diutamakan, mengingat DPR periode 2004-2009 masih banyak menyisakan berbagai RUU, baik RUU yang datang dari Pemerintah maupun RUU yang datang dari DPR.

Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui hasil kerja Badan Legislasi (Baleg) yaitu penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk kurun waktu 2010-2014 berjumlah 247 RUU baik yang berasal dari Pemerintah maupun dari Dewan, di antaranya 5 RUU yang masuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka. Baleg juga telah menetapkan 57 (lima puluh tujuh) RUU yang menjadi prioritas untuk tahun 2010, di antaranya adalah RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; RUU tentang Perubahan UU No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah; RUU tentang Perubahan UU No.2 tahun 2008 tentang Parpol; RUU tentang Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; RUU tentang Perubahan UU tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; RUU tentang Perubahan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan; RUU tentang Perubahan UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan; RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Pimpinan mengharapkan, mudah-mudahan pada akhir masa bhakti 2014 sekurang-kurangnya 80% dari RUU yang ditetapkan Prolegnas dapat diselesaikan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Adapun fungsi anggaran yang terutama menjadi porsi Badan Anggaran sifatnya masih melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBN 2009. Sementara itu, pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2008, sesuai keputusan Badan Musyawarah, diputuskan dikembalikan lagi kepada presiden, yang pada saatnya akan disampaikan kepada DPR sesuai prosedur dan mekanisme Tata-Tertib DPR. Satu alat kelengkapan Dewan yang baru yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) diharapkan dapat melaksanakan program-program yang nyata dalam membantu Badan Anggaran dan Komisi-Komisi Dewan dalam menelaah laporan hasil pemeriksaan BPK. Badan ini akan melakukan ringkasan temuan BPK beserta analisis kebijakan dan menyerahkannya kepada Pimpinan dan komisi-komisi Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, komisi-komisi Dewan menaruh perhatian terhadap program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Di samping itu, Komisi-komisi Dewan telah melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang sedang berkembang yang sedang disoroti masyarakat akhir-akhir ini, antara lain masalah

penegakan hukum terkait kasus proses hukum atas dua pimpinan KPK non-aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Menghadapi masalah yang amat menyita perhatian masyarakat, DPR sebagai wakil rakyat merespon dengan cepat melalui Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi Dewan dengan Kapolri, Jaksa Agung dan Pimpinan KPK secara terpisah dan Rapat Dengar Pendapat DPR dengan ketiga instansi tersebut secara bersamaan. Atas kasus ini Presiden telah membentuk Tim Delapan (Tim 8) yang bertugas untuk melakukan investigasi kepada pihak-pihak yang terkait dan hasilnya dalam bentuk rekomendasi telah disampaikan kepada Presiden.

Atas dasar rekomendasi tim 8, Presiden RI telah memutuskan agar kasus Bibit-Chandra tidak dibawa ke Pengadilan. Penghentian penyelidikan dan penghentian penuntutan dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, sesuai peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku. Mengenai hal ini, telah dikeluarkan SKPP (Surat Keputusan Penghentian Perkara) oleh Kejari Jakarta Selatan terhadap Bibit Samad dan Chandra Hamzah, beberapa hari yang lalu. Presiden juga meminta kepada tiga institusi penegak hukum Polri, Kejaksaan dan KPK, untuk segera melakukan pembenahan ke dalam.

Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi III telah menetapkan bahwa persoalan ini perlu diselesaikan sesuai dengan **sistem hukum dan peraturan perundangan yang berlaku**; perlu **meningkatkan koordinasi dan sinergi dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi**, dan **perlu dilakukan tindakan tegas atas mafia hukum dan makelar hukum** serta perlunya diperbaiki sistem prosedur dan mekanisme pengawasan internal.

Kesimpulan Komisi III ini perlu didukung, karena kita semua berkehendak bahwa tugas dari tiga lembaga penegak hukum tersebut jangan sampai ada benturan. Bangsa ini adalah bangsa besar, kita tidak boleh larut dalam perdebatan. Persoalan hukum yang muncul tidak boleh mengurangi eksistensi masing-masing lembaga. Bangunan besar

dalam kerangka penegakan hukum harus berorientasi kepada peningkatan kualitas masing-masing lembaga penegak hukum.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II, rakyat berharap para menteri akan dapat menciptakan perubahan yang lebih baik pada masa mendatang, khususnya dalam bidang ekonomi. Walaupun kondisi ekonomi saat ini masih dalam tahap pemulihan setelah krisis global, harapan masyarakat tersebut wajar sebagai perwujudan meningkatnya edukasi dan dinamisasi publik. Harapan lebih dalam biasanya datang dari kelompok masyarakat sektor informal seperti buruh, nelayan, petani, dan usaha kecil. Dewan mengharapkan, dalam memenuhi harapan masyarakat, para menteri sebagai pembantu Presiden dalam mendesain kebijakan dibutuhkan paradigma pemikiran yang lebih luas, disertai inovasi dan terobosan baru, bukan hanya sekedar penciptaan kebijakan yang normatif dan standar saja, perlu akselerasi dalam penciptaan ataupun pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kita berpendapat bahwa Indonesia dapat mencatatkan diri sebagai satu di antara sedikit negara yang masih mampu tumbuh positif di tengah-tengah kondisi ekonomi dunia yang mengalami krisis. Namun demikian, Indonesia belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan mendasar, hal ini ditandai dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi.

Kalangan Dewan berpendapat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran diperlukan investasi yang besar guna mencapai pertumbuhan yang tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, kemampuan Pemerintah masih terbatas, sehingga selebihnya investasi diharapkan datang dari investor swasta dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, Dewan sangat berharap agar Pemerintah dapat

meyakinkan masyarakat apa yang dicanangkan dalam program 100 hari, dapat mencapai target.

Dalam menjalankan program 100 hari, kami percaya para menteri telah melakukan koordinasi, mengingat segala permasalahan terkait dengan investasi banyak melibatkan birokrasi dan infrastruktur. Dengan program yang terkoordinasi akan didapatkan suatu solusi atau stimulus yang bisa mempercepat laju investasi. Dewan mengkhawatirkan apabila program tersebut tidak berjalan, dapat menimbulkan adanya ketimpangan, berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan buruknya kualitas infrastruktur yang tidak merata antar daerah. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat laju investor datang ke Indonesia.

Terkait dengan energi, kalangan Dewan berpendapat, bahwa Pemerintah harus turun tangan untuk dapat segera menyelesaikan krisis energi listrik, yakni aksi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, Pemerintah harus segera mengatasi pemadaman listrik. Hal ini penting mengingat terganggunya ketersediaan energi listrik menghambat proses produksi, tidak terkecuali industri-industri kecil. Dewan menampung berbagai keluhan setelah terjadinya gangguan akibat kerusakan infrastruktur pembangkit tenaga listrik yang berakibat kepada kekurangan pasokan ke sejumlah sentra-sentra industri. Kalangan pengusaha mencemaskan kegiatan investasi bakal menurun akibat tidak adanya jaminan pasokan listrik. Masyarakat berpendapat kalau ini terjadi ada kekhawatiran bahwa Pemerintah dan manajemen PT. PLN tidak mampu menjamin kelangsungan kegiatan investasi di Indonesia. Untuk ketersediaan listrik jangka menengah dan panjang, diperlukan sumber-sumber energi listrik yang baru seperti *geothermal* dan sumber energi yang terbarukan, agar pasokan gas untuk pembangkit tenaga listrik dalam posisi aman sampai tahun 2015.

Sidang Dewan yang terhormat,

Permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak luput dari pembahasan Dewan dan Pemerintah. Baik berkaitan permasalahan persiapan, pelaksanaan maupun kemungkinan dilakukannya penundaan Pilkada yang akan berlangsung tahun 2010 menjadi 2011. Dalam kurun waktu menjelang akhir tahun 2009 ini dan pada tahun 2010 mendatang, tampaknya masih terjadi tarik menarik pertimbangan terhadap rencana akan dilaksanakannya serangkaian Pilkada di beberapa daerah. Pertimbangan ini bermuara pada kemampuan dari aparat dan dukungan berbagai pihak, terutama dari segi pengadaan anggaran, perangkat aturan pelaksanaan dan peranan fasilitator dari pihak Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada. Kalau memang nantinya Pilkada akan dilaksanakan, maka jelas bahwa agenda tersebut membutuhkan persiapan tertentu yang harus dilakukan terutama bagi pihak penyelenggara Pilkada, yaitu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas (Bawaslu), hingga di tingkat aparat pelaksana pada masing-masing kewenangannya yang dimiliki di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Ketidaksiapan atas proses penyelenggaraannya, hanya menimbulkan gejolak yang bukan mustahil mengarah pada kekacauan di daerah setempat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitan dengan fungsi pengawasan, dalam masa sidang ini, **503 anggota Dewan telah mengajukan usul untuk menggunakan hak angket dalam kasus Bank Century.**

Terhadap kasus Bank Century, DPR 2004-2009 telah mengirim surat kepada BPK pada tanggal 1 September 2009, yang berisi permohonan audit investigasi/pemeriksaan terhadap Bank Century, meliputi:

1. Dasar hukum, dan proses pengambilan keputusan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan status Bank Century yang berdampak sistemik.
2. Jumlah dan penggunaan Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang telah diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelamatkan Bank century.
3. Status dan dasar hukum pengusulan dana setelah peraturan pemerintan pengganti Undang-undang No 4 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditolak oleh DPR.

Atas surat ini, BPK telah menyerahkan hasil audit/investigasi bank Century pada tanggal 23 November. Dari hasil pemeriksaan BPK **patut diduga** terjadi pelanggaran-pelanggaran antara lain:

1. proses merger dan pengawasan Bank Century oleh Bank Indonesia ini tidak tegas dan tidak *prudent* dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri, Bank Indonesia tidak bertindak tegas terhadap penganggaran Bank Century selama 2005-2008.
2. pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), Bank Indonesia patut diduga melakukan perubahan persyaratan *capital adequacy ratio* (CAR) dalam PBI agar Bank Century dapat memperoleh fasilitas pendanaan jangka Pendek (FPJP), padahal *capital adequacy ratio* (CAR) telah negatif 3,53%.
3. penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). BPK berpendapat bahwa penyaluran dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century setelah tanggal 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.
4. penggunaan dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) telah melanggar ketentuan PBI yang menyatakan bahwa Bank berstatus “dalam pengawasan khusus” dilarang melakukan transaksi kecuali memperoleh persetujuan Bank Indonesia, dan Bank Century

mengganti deposito milik salah satu nasabah sebesar USD 18 Juta dengan dana dari Penyertaan Modal Sementara (PMS).

5. terjadi praktek-praktek tidak sehat dan pelanggaran ketentuan oleh pengurus Bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelompokan Bank Century yang merugikan Bank Century.

Pada tanggal **1 Desember dalam Rapat Paripurna Dewan, usul hak angket anggota dewan telah mendapat persetujuan menjadi Hak Angket DPR-RI tentang pengusutan Kasus Bank Century, dan pada rapat paripurna tadi pagi Panitia angket telah terbentuk beranggotakan 30 orang.** Proses selanjutnya akan ditangani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPR-RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang transportasi, DPR sangat menyesalkan masih tingginya angka kecelakaan transportasi yang telah menelan korban jiwa. Pada kesempatan ini, atas nama DPR, kami menyatakan belasungkawa atas meninggalnya para korban tragedi tenggelamnya kapal Dumai Ekspres 10 di perairan Hiu Kecil Tanjung Sekoci Kepulauan Riau yang terjadi pada tanggal 22 November 2009 lalu. Atas kondisi seringnya kecelakaan transportasi ini, melalui Komisi V, DPR akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Transportasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Paket UU Transportasi, yaitu UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pembentukan Panja ini merupakan upaya DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan transportasi.

Dalam bidang Kesra, masalah penyelenggaraan haji tahun ini tidak lepas dari pengawasan Dewan. DPR telah mengirim perwakilan dari Komisi VIII dan Komisi IX untuk memantau masalah-masalah

penyelenggaraan haji tahun ini, termasuk berkaitan dengan kesehatan jamaah haji. Kalangan Dewan berpendapat bahwa, penyelenggaraan haji ini, dari tahun ke tahun harus ditingkatkan dengan manajemen haji yang memuaskan jamaah. Persoalan transportasi, *catering*, pemondokan, merupakan masalah yang harus mendapatkan perbaikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, keberadaan dua tim pada tahap persiapan dan pada tahap penyelenggaraan haji diharapkan menjadi masukan bagi perbaikan manajemen penyelenggaraan haji pada tahun-tahun ke depan.

Belum lagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias akibat gempa dan tsunami yang dahsyat selesai dengan tuntas, beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan dengan serangkaian gempa yang terjadi di sepanjang Pulau Sumatera, terbesar di Sumatera Barat, dan Pulau Jawa yang menyebabkan ratusan korban meninggal, luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. Berkaitan dengan bencana alam tersebut, melalui Sidang Badan Musyawarah, Dewan memutuskan untuk membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam yang terdiri dari Tim Pengarah yang bersifat permanen dan sub-tim yang bersifat *ad-hoc*. Sub-tim yang segera dibentuk adalah sub-tim penanggulangan bencana alam Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Jawa Barat.

Dalam Bidang Kesehatan, Komisi IX telah melakukan Rapat Kerja dengan menteri terkait. Selain membahas program 100 hari kerja Departemen Kesehatan, Dewan juga telah meminta keterangan tentang laboratorium *Naval Medical Research Unit (NAMRU II)*, *Millenium Development Goals (MDGs)*, pembahasan mengenai Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), peningkatan penderita AIDS. Masalah-masalah lain, berkaitan dengan kematian TKW di Malaysia, kepailitan PT. Cipta TPI yang dapat mengancam terjadinya PHK terhadap lebih dari seribu pekerja.

Komisi IX juga menaruh perhatian khusus tentang pengobatan massal kaki gajah terkait tewasnya sembilan orang di Kabupaten

Bandung Jawa Barat. Komisi kesehatan DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mencari kejelasan kasus ini. Pimpinan Dewan juga menaruh perhatian terhadap adanya indikasi malpraktek di Rumah Sakit Insani Stabat, yang membawa akibat ibu muda meninggal karena salah transfusi. Peristiwa ini hendaknya menjadi pelajaran dan seharusnya tidak boleh terjadi lagi.

Pembahasan juga dilakukan berkaitan dengan *Millenium Development Goals* (MDGs), sehubungan dengan komitmen internasional menuju Pembangunan Millennium 2015. Ini menjadi dasar bagi perumusan strategi penanggulangan kemiskinan nasional dan di berbagai daerah, yang menyangkut pendidikan dan kesehatan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Keterkaitan dengan hak Dewan dalam penentuan pejabat publik, Komisi Yudisial telah menyampaikan usulan 15 (limabelas) nama calon Hakim Agung untuk dibahas oleh DPR sesuai mekanisme Dewan. Disamping itu masih ada enam usulan calon Hakim Agung yang belum dibahas. Dengan demikian ada 21 (dua puluh satu) calon Hakim Agung untuk mengisi tujuh calon Hakim Agung yang kosong, yang akan ditangani oleh Komisi III.

DPR juga telah menyetujui pertimbangan bagi duta-duta besar bagi negara sahabat yang ditempatkan untuk Republik Indonesia dari Republik Ekuador, Republik Liberia, Republik Panama, Kerajaan Malaysia, Republik Demokrasi Rakyat Aljazair, Kerajaan Thailand, dan Konfederasi Swiss. Setelah melalui proses mekanisme Dewan, pertimbangan ini telah disampaikan kepada Presiden.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masalah luar negeri tidak luput dari perhatian Dewan. Satu tragedi kemanusiaan baru-baru ini terjadi di Provinsi Maguindino, Filipina Selatan. Iring-iringan kendaraan dalam rangka kampanye pemilihan

gubernur setempat telah ditembaki secara membabi buta. Pembunuhan massal ini telah menewaskan 57 orang, di antaranya wanita dan anak-anak serta 22 wartawan. Peristiwa ini mengundang perhatian internasional. Kita sangat prihatin. Nurani kita tersentuh, tidak dapat menerima kebrutalan semacam itu. Mudah-mudahan tragedi ini merupakan pelajaran berharga, tidak boleh terjadi di negara mana pun, oleh siapa pun. Kompetisi dalam memperbutkan jabatan politik tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, apalagi sampai membawa korban jiwa.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang berlangsung di Singapura dari tanggal 8 sampai dengan 15 November 2009 tidak luput dari perhatian Dewan. Komitmen negara-negara peserta untuk menghindari proteksionisme dalam perdagangan internasional patut digarisbawahi. Hal ini penting karena pada saat perekonomian dunia tengah menghadapi ketidakpastian akibat krisis ekonomi global, komitmen demikian sangat dibutuhkan guna tetap menjamin mekanisme perdagangan dunia yang adil, seimbang, dan menguntungkan semua negara. Kami mengharapkan agar komitmen tersebut semakin mendorong bangsa kita untuk semakin produktif dan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Apa yang telah dihasilkan dalam Konferensi APEC sebenarnya juga menjadi perhatian Dewan, sebab dalam kenyataannya Dewan bukan hanya aktif dalam merespon berbagai perkembangan yang terjadi di tanah air, tetapi juga aktif dalam berbagai forum pertemuan keparlemenan internasional yang berkaitan dengan berbagai masalah antara lain perubahan iklim, perdagangan dunia, dan masalah-masalah ekonomi lainnya.

Dalam masalah perubahan iklim, pada tanggal 17-19 November 2009, DPR-RI telah mengirimkan delegasinya untuk menghadiri *General*

Assembly of Asia Pasific Parliamentarians Conference on Environment and Development ke 14 di Palau. Bagi Indonesia, konferensi ini mempunyai nilai strategis karena dalam forum ini dibicarakan tentang perubahan iklim dan pengembangan energi terbarukan, mengingat dampak yang ditimbulkannya kini telah mulai dirasakan oleh bangsa-bangsa di dunia.

Anggota Dewan juga memperhatikan dengan serius perkembangan ekonomi global dan krisis ekonomi dunia yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, pada forum ini, perlu kami sampaikan bahwa DPR-RI juga telah mengirimkan delegasinya ke pertemuan *Parliamentary Hearing at the United Nations* yang berlangsung di New York pada tanggal 19 dan 20 November 2009. Pertemuan ini mengambil tema “*The Way Forward—Building Political Support and Implementing Effective Responses to the Global Economic Crisis*”.

Pertemuan lainnya adalah Konferensi Ketua-Ketua Parlemen se-Dunia ke-3 yang diselenggarakan di New York pada tanggal 16-17 November 2009 yang dihadiri oleh Ketua DPR-RI. Pertemuan ini sangat penting bagi perkembangan kedewanan ke depan, karena tidak hanya membicarakan masalah perekonomian dunia saat ini, tetapi juga tentang perkembangan demokrasi serta hubungan antar parlemen negara-negara anggota *Inter Parliamentary Union (IPU)*. Melalui pembicaraan maupun diskusi mendalam yang berlangsung dalam konferensi tersebut, diharapkan negara-negara yang hadir dalam pertemuan itu akan lebih memahami tentang perkembangan situasi ekonomi dan politik internasional, sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh Negara-negara bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya selama masa sidang I ini, BKSAP juga telah mengirimkan delegasi RI ke konferensi-konferensi, baik yang bersifat regional maupun internasional. Konferensi tersebut antara lain; Sidang *Sub-Committee APA on Energy* di Istanbul, Turki; sidang *Ad-Hoc Committee on APA Financial Regulation* di Teheran, Iran. Selain itu,

dalam waktu dekat delegasi DPR-RI juga akan dikirim untuk berpartisipasi dalam sidang-sidang antara lain sidang *Parliamentary Conference on Ensuring Acces to Health for All Woman and Newborn: The Role of Parliaments* di kampala Uganda; *AIPA Seminar on The Role of Women Parliamentarians in Law Making Process* di Hanoi, Vietnam; *IPU Regional Seminar on HIV/AIDS* di Hanoi, Vietnam; *Parliamentary Meeting on The Occasion of The UN Climate Change Conference* di Kopenhagen, Denmark; dan sidang tahunan ke-18 *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* di Singapura.

Kita sangat mengharapkan bahwa para anggota Dewan bukan hanya berpartisipasi menghadiri pertemuan-pertemuan internasional, tetapi juga membawa pemahaman baru mengenai substansi yang dibahas yang dijadikan sebagai bahan pembanding atau masukan dalam melaksanakan fungsi-fungsi Kedewanan.

Saat ini DPR-RI sedang mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan sidang pleno ke-4 *Asian Parliamentary Assembly (APA)* yang akan berlangsung pada 7-10 Desember 2009 di Bandung sesuai dengan keputusan Sidang *Executive Council APA* bulan Agustus 2009 lalu. Penyelenggaraan sidang ini terkait dengan kedudukan Ketua DPR-RI yang saat ini menjabat sebagai Presiden APA. Sidang APA ini mengambil tema "*The Roles of Asian Parliaments in Streghtening Democracy Toward Prosperity, Peace and Justice in the Region*". Dalam sidang nanti akan dibahas berbagai isu, menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi kepentingan negara-negara di kawasan Asia. Dengan sidang ini diharapkan hubungan kerjasama antar parlemen di kawasan Asia akan semakin meningkat dalam menyikapi berbagai isu, baik yang menjadi kepentingan Asia maupun isu-isu yang menjadi kepentingan global. Sidang APA ke-4 di Bandung akan dihadiri oleh 39 (tiga puluh sembilan) negara anggota, 18 (delapan belas) negara observer dan 3 (tiga) organisasi internasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan serta berbagai permasalahan yang menjadi perhatian Dewan dalam Masa Sidang I ini. Pimpinan Dewan mengucapkan “**Selamat Bertugas**” kepada para Anggota Dewan yang akan melakukan kunjungan kerja. Selanjutnya izinkanlah kami menutup Sidang Paripurna Dewan. *Inshaallah* kita akan bertemu kembali tanggal 5 Januari 2010 untuk mengawali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010. Kita tutup sidang ini, dengan ucapan syukur *Alhamdulillah Robbil'alamin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 4 Desember 2009

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

H. MARZUKI ALIE